



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 67);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 67) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 92

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 92 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 67  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA  
KERJA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis (Renstra). Ada beberapa hal yang harus diketahui mengenai Perubahan Rencana Kerja.

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD
3. Persiapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi tahap penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

4. Penyusunan Perubahan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juni, berpedoman pada Renstra
5. Perangkat Daerah, evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.
6. Penyusunan rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu.

Mengingat arti strategis Perubahan Rencana Kerja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut disusun dengan berpedoman pada landasan hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah

- Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
  31. Peraturan Bupati Garut Nomor 0000 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Badan/Dinas/Kecamatan ..... Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 0000);
  32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RKT dan Rencana Aksi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika naskah Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut 2023 disusun, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

- 2.1 Analisis hasil pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB IV PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**  
**TAHUN 2023**

**2.1 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut meliputi sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada rencana strategis. Sasaran dalam rencana kerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan diantaranya dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2023 pada sisi akuntabilitas keuangan, belanja daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1**  
**Analisis Hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II**  
**Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target/Pagu Anggaran Sebelum Perubahan	Target/Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Jumlah Realisasi	
					Capaian Realisasi %	Saldo Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
I.	PENDAPATAN	12.050.000	12.050.000	8.481.300	70,38	- 3.568.700

	<b>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>12.050.000</b>	<b>12.050.000</b>	<b>8.481.300</b>	<b>70,38</b>	<b>- 3.568.700</b>
<b>II</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>17.737.051.317</b>	<b>17.961.237.149</b>	<b>9.881.981.618</b>	<b>55,48</b>	<b>7.855.069.69 9</b>
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.532.840.437</b>	<b>11.314.907.809</b>	<b>6.049.501.664</b>	<b>52,45</b>	<b>115.467.243</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.342.733	10.342.733	6.009.000	58,10	4.333.733
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.055.730	20.054.770	12.053.000	60,10	8.002.370
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.719.222.264	5.628.010.073	3.589.660.873	62,76	2.129.561.39 1
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.156.400	44.616.000	7.000.000	97,81	156.400
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	211.944.600	211.944.600	210.109.300	99,13	1.835.300
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.212.900	7.169.800	3.057.500	49,21	3.057.500
7	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.578.900	72.714.400	57.628.400	80,51	13.950.500
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.495.900	14.772.300	7.507.900	45,51	8.988.000
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.788.800	9.788.800	5.849.600	59,76	3.939.200
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	8.475.000	8.475.000	5.424.000	64,00	3.051.000
11	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.125.320	8.125.320	4.484.000	55,19	3.641.320
12	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.365.350	19.365.350	9.588.200	49,51	9.777.150

13	Penatausahaan Arisp	9.996.500	9.996.500	0	0	9.996.500
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan	823.799.850	778.830.940	727.119.600	88,26	96.680.250
15	Pengadaan Mebel	142.140.850	142.140.850	0	0	142.140.850
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.126.800	185.573.700	169.450.000	98,44	2.676.800
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.999.960.000	3.766.933.173	1.144.243.000	28,61	2.855.717.000
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.946.800	69.946.800	41.743.791	59,68	28.203.009
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.900.000	9.900.000	2.820.000	28,48	7.080.000
20	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.686.100	23.686.100	13.466.000	56,85	10.220.100
21	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.870.000	52.870.000	4.059.800	14,07	24.790.200
22	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	28.850.000	28.850.000	4.059.800	14,07	24.790.200
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.800.000	190.800.000	17.449.000	19,22	73.351.000



<b>B</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>6.204.210.880</b>	<b>5.244.730.022</b>	<b>3.832.479.954</b>	<b>61,77</b>	<b>2.371.730.92 6</b>
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.183.678.280	3.068.019.040	2.065.861.129	64,89	1.117.817.15 1
2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.138.449.800	1.781.249.800	668.636.325	58,73	469.813.475
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.065.164.00	1.184.625.800	795.625.900	74,70	269.538.100
4	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	540.091.500	335.607.400	121.831.400	22,56	418.260.100
5	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	63.633.000	63.633.000	51.339.400	80,68	12.293.600
6	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	35.030.000	35.030.000	24.890.000	71,05	10.140.000

7	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	46.331.700	46.331.700	37.488.400	80,91	8.843.300
8	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	87.513.400	87.513.400	44.950.400	48,64	44.950.400
9	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evaluasi	44.319.200	44.319.200	24.244.400	54,70	20.074.800

Pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II, Realisasi Belanja Daerah adalah sebesar **Rp. 9,881,981,618,-** atau sebesar **55,48,- %** yang terdiri dari Belanja Program Penunjang sebesar **Rp. 6,049,501,664,-** atau sebesar **52,45,- %**, Belanja Program Pencegahan Penanggulangan Kebakaran sebesar **Rp. 3,832,479,954,-** atau sebesar **61.77,- %**.

Dalam hal capaian kinerja sasaran program Tahun 2023 terhadap dokumen perencanaan yang ada yaitu Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dapat diambil kesimpulan secara umum mengenai pencapaian sasaran program/kegiatan terhadap dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menunjukkan kinerja sasaran yang cukup baik.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Dalam jangka waktu yang pendek pengukuran meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*Outcome*).

Pelaksanaan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut tahun anggaran 2023 dengan capaian yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, sebagai berikut :

Tabel 2.1.2

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan					
						Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	10	10	10	100	10	30	7,50

1	051	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50	10	10	10	100	10	30	7,50
1	051	01	02.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										
1	051	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	14	14	14	100	14	42	10,50
1	051	01	02.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										
1	051	01	02.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15	13	13	13	100	13	39	9,75
1	051	01	02.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	540	105	105	105	100	105	315	78,75
1	051	01	02.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										

1	051	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45	9	9	9	100	9	27	6,75
1	051	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	170	34	34	34	100	34	102	25,50
1	051	02.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	15	15	15	100	15	45	11,25
1	051	02.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25	5	5	5	100	5	15	3,75
1	051	02.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	710	33	33	33	100	33	99	25

1	05102.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.100	255	255	255	100	255	765	191
1	05102.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	960	48	48	48	100	48	144	36
1	05102.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	1	1	1	100	1	3	1
1	05102.017	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										
1	05102.011	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	6	2
1	05102.015	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	-	10	-	-			

1	051	02.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	2	2	2	100	2	6	2
1	051	02.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	-	-	-	1	1	0
1	051	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										
1	051	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	9
1	051	02.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	2	2	2	100	2	6	2
1	051	02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	3	3	3	100	3	9	2

1	0	0	02.0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
1	0	0	02.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	105	21	21	21	100	21	63	16				
1	0	0	02.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	105	21	21	21	100	21	63	16				
1	0	0	02.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 POS dan 3 UPT	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	-	-	-	-	5	5	1				
1	0	0			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>														
1	0	0	2.01		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>														
1	0	0	2.01	0	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya												



							Kabupaten										
1	0	0	2.01	0	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60	12	12	12	100	12	36	9	
1	0	0	2.01	0	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi siap pakai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun),	20	4	4	4	100	4	12	3	
1	0	0	2.01	0	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Meningkatnya Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	85	17	17	17	100	17	51	13	

1	0	0	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang Berkompeten	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	690	105	105	105	100	105	315	79
1	0	0	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	##### #####								
			2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terselenggaranya Peringatan HUT Damkar Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5	1	1	1	100	1	3	1
1	0	0	0		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>										
1	0	0	2.01	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Meningkatnya jumlah gedung yang terproteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	500	100	100	100	100	100	300	75
1	0	0	0		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>										

1	0	0	0	0	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	600	120	120	120	100	120	360	90
1	0	0	0	0	0	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	100	5	5	5	100	5	15	4
1	0	0	0	0	0	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>										
1	0	0	02.0	0	0	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Meningkatnya Jumlah Petugas Penyelamatan (Rescue) yang Berkompetensi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	250	50	50	50	100	5	105	26

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pemadaman Kebakaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Pengaturan SPM Sub Urusan Kebakaran meliputi:

1. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
3. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
4. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran;
5. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;

3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran;
6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran

Dalam menentukan pencapaian pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Garut masih terkendala dikarenakan belum selesainya penyusunan Pedoman Teknis Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.

**Tabel 2.2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS)	1	Persentase Cakupan Wilayah manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS)	%	100,00	46,66	46,66	Belum tercapai (dari target 15 POS baru terealisasi 7 POS)
2	Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	1	Persentase penanganan kebakaran dengan respon time <15 menit di wilayah manajemen kebakaran	%	100	100	100,00	Tercapai
		2	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran yang dapat ditangani	%	100	100	100,00	Tercapai
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	80	85,96	107,45	Melebihi Target

Tabel 2.2.2

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam response time 15 menit (WMK/Kecamatan/POS)			100	100	100	100	33,33	46,66	60,00	100,00	Akan tercapai target jika pada Tahun 2024 ada Pembangunan POS sebanyak 4 POS Baru
2	Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran			100	100	100	100	100	100	100	100	Semua terlayai
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran			79	80	83	85	85	85,96	85,99	86	Melebihi Target

### **2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
3. Urusan Kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Damkar dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan tugas teknis penunjang tertentu pada Dinas Damkar dan Penyelamatan.
6. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Urusan Kebakaran.
7. Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu adalah kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas investigasi kejadian kebakaran, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta perbengkelan sarana prasarana pemadam kebakaran.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk:

- a. Mencapai pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan melalui Perangkat Daerah Dinas Damkar dan Penyelamatan;



- b. Merumuskan kelembagaan Dinas Damkar dan Penyelamatan yang memiliki standardisasi nomenklatur, fungsi dan struktur kelembagaan di provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Melakukan pembinaan umum, pembinaan teknis, dan pengawasan Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Dalam hal ini Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut adalah tidak adanya cangkolan bagi Pemadam kebakaran untuk bisa mengajukan anggaran ke pusat dan provinsi dikarenakan Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 baru ditetapkan tahun 2020 sehingga belum terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tingkat Provinsi ataupun di Pusat.

**Isu-isu Strategis** Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut:

- Kurangnya Tempat Layanan atau POS Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sehingga beberapa kejadian terlambat di tangani,
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran,
- Kurangnya SDM Petugas Pemadam Kebakaran,
- Belum adanya koordinasi dengan instansi berkaitan dengan pencegahan dan penganggulangan bahaya kebakaran dan penanganan pasca kebakaran.
- Masih kurangnya peran serta dan pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran.
- Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pemadam Kebakaran.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.**

Program dan kegiatan prioritas terdiri dari 2 program, 12 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan pada rancangan awal RKPD, secara rinci disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Targ et Akhi r Peri ode RPJ MD	Reali sasi Capa ian RKP D Tahu n 2021	Praki raan Capai an Targe t RKPD Tahu n 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelom pok Sasara n	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perang kat Daerah Penang gung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targe t	Pagu Indikatif					
						Semul a	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubah an			Nasional					Daera h			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0 5					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					25.129.8 25.618	18.209.7 85.801	17.669.6 55.679		27.635.8 99.615						
1	0 5	0 1				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA</b>	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Poin	Poin	100 Poin	100 Poin	<b>13.361.5 89.771</b>	<b>11.929.7 26.501</b>	<b>11.465.4 44.799</b>		100 Poin	<b>14.192.6 63.768</b>				
1	0 5	0 1	2, 01			<b>Perencanaan, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Sistem Perencanaan	Poin	Poin	100 Poin	100 Poin	<b>60.000.0 00</b>	<b>34.577.3 93</b>	<b>30.398.1 03</b>		100 Poin	<b>60.000.0 00</b>				
1	0 5	0 1	2, 01	0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan			10 Doku men	10 Dokumen 10 Dokumen	30.000.00 0	11.257.39 3	10.342.73 3	Kab. Garut, Tarog ong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum- u <sub>D</sub> ngana Bagi Hasil	7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerja	Dinas Pemada m Kebakar an	10 Doku men 10 Doku men	30.000.00 0	Dinas Pemada m Kebakar an

						Perangkat Daerah									aparatur						
1	0	0	2,	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan 10 Dokumen	10 Laporan 10 Dokumen	30.000.000	23.320.000	20.055.370		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur		Dinas Pemadam Kebakaran	10 Laporan 10 Dokumen	30.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran

1	051	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan Dinas Pemadam Kebakaran	Persen		Person	100 Person	100 Persen	<b>6.823.630.331</b>	<b>6.104.824.508</b>	<b>5.651.826.626</b>				100 Person	<b>7.505.993.364</b>			
1	051	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji ASN di Dinas Pemadam Kebakaran				48 Orang/bu 14 Bulan	48 Orang/bu 14 Bulan	6.823.630.331	6.104.824.508	5.651.826.626	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran	48 Orang/bu 14 Bulan	7.505.993.364	Dinas Pemadam Kebakaran
1	051	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya SDM Aparatur yang Profesional	Poin		Poin	100 Poin	100 Poin	<b>358.514.780</b>	<b>219.101.000</b>	<b>219.101.000</b>				100 Poin	<b>369.501.278</b>			
1	051	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Tersedianya Unit Peningkatan				4 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit	50.000.000	7.156.400	7.156.400	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurpanggung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat	Dinas Pemadam Kebakaran	4 Unit 4 Unit	50.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran



1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34 Paket 34 Jenis	34 Paket 34 Jenis	100.000.00	71.578.900	71.578.900	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana Bagi <sup>u</sup> H <sup>ng</sup> asil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Dinas Pemadam Kebakaran	34 Paket 34 Jenis	100.000.00	Dinas Pemadam Kebakaran	
1	05	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				5 Paket 5 Jenis	5 Paket 5 Jenis	16.500.00	16.495.900	16.495.900	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana Bagi <sup>u</sup> H <sup>ng</sup> asil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran	5 Paket 5 Jenis	18.150.00	Dinas Pemadam Kebakaran
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				5 Paket 5 Jenis	5 Paket 5 Jenis	50.000.00	9.788.800	9.788.800	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana Bagi <sup>u</sup> H <sup>ng</sup> asil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran	5 Paket 5 Jenis	50.000.00	Dinas Pemadam Kebakaran

1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				142 Dokumen 142 Eksempl	n142 Dokumen 142 Eksempl	n 13,200,000	8.475.000	8.475.000	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran	142 Dokumen 142 Eksempl	n 13,200,000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	05	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1020 Laporan 1020 OH	n1020 Laporan 1020 OH	n 33,000,000	9.559.200	8.125.320	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran	1020 Laporan 1020 OH	n 36,300,000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				192 Laporan 192 OH	192 Laporan 192 OH	100.000.000	24.996.000	19.365.350	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran	192 Laporan 192 OH	100.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	05	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	9.996.500	9.996.500	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	7. Peningkatan pelayanan publik dan	Dinas Pemadam Kebakaran	1 Dokumen	15.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran

															angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	kinerja aparatur					
1	051	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Poin	Poin	100 Poin	100 Poin	<b>4.695.00 0.000</b>	<b>5.138.06 7.500</b>	<b>5.138.02 7.500</b>					100 Poin	<b>4.700.00 0.000</b>		
1	051	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	550.000.0 00	823.799.8 50	823.799.8 50	Kab. Garut, Tarog ong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum- Dana uAnglok asi Umum		7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pepad am Kebakar an	1 Unit 1 Unit	550.000.0 00	Dinas Pemada m Kebakar an
1	051	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya jumlah Mebeulair yang memadai			10 Unit 9 Jenis	10 Unit 9 Jenis	135.000.0 00	142.140.8 50	142.140.8 50	Kab. Garut, Tarog ong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum- Dana Bagi uHngasil		7. Pening katan pelaya nan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pepad am Kebakar an	10 Unit 9 Jenis	135.000.0 00	Dinas Pemada m Kebakar an



1	051076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				2 Unit 4 Buah	2 Unit 4 Buah	10.000.000	172.126.800	172.126.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran	2 Unit 4 Buah	15.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	051070	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.000.000.000	4.000.000.000	3.999.960.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpang	Dana Transfer Umum-Dana uAnglokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran	1 Unit	4.000.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	05108	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Poin	Poin	100 Poin	100 Poin		<b>132.165.660</b>	<b>103.532.900</b>	<b>103.532.900</b>						100 Poin	<b>145.382.226</b>	
1	051082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	94.600.000	69.946.800	69.946.800	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran	12 Laporan 12 Bulan	104.060.000	Dinas Pemadam Kebakaran

1	05	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersediannya				2 Laporan 2 Jenis	2 Laporan 2 Jenis	11.095.700	9.900.000	9.900.000	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum- <sup>u</sup> Dngana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Dinas Pemadam Kebakaran	2 Laporan 2 Jenis	12.205.270	Dinas Pemadam Kebakaran
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersediannya				2 Laporan 2 Jenis	2 Laporan 2 Jenis	26.469.960	23.686.100	23.686.100	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum- <sup>u</sup> Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Dinas Pemadam Kebakaran	2 Laporan 2 Jenis	29.116.956	Dinas Pemadam Kebakaran
1	05	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Poin		Poin	100 Poin	100 Poin	<b>958.579.000</b>	<b>172.520.000</b>	<b>172.520.000</b>						100 Poin	<b>1.067.036.900</b>	
1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersediannya				21 Unit 21 STNK	21 Unit 21 STNK	84.579.000	52.870.000	52.870.000	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum- <sup>u</sup> Dngana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Dinas Pemadam Kebakaran	21 Unit 21 STNK	93.036.900	Dinas Pemadam Kebakaran

						Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
1	0	0	2,	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 Unit 2 Jenis	21 Unit 2 Jenis	524.000.000	28.850.000	28.850.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	Dana Transfer Umum-Dngana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran	21 Unit 2 Jenis	524.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran

1	051	0209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7 Unit 0 Unit 7 Bangunan Kantor	7 Unit 0 Unit 7 Bangunan Kantor	350.000.000	90.800.000	90.800.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpang	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran	7 Unit 0 Unit 7 Bangunan Kantor	450.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	054			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	% Persen	% Persen	69 % 69 Persen	69 % 69 Persen	<b>11.768.235.847</b>	<b>6.280.059.300</b>	<b>6.204.210.880</b>							69 % 69 Persen	<b>13.443.235.847</b>	

1	054	2,01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran	%	%	69 %	69 %	10.468.235.847	6.030.059.300	5.991.016.580					69 %	12.093.235.847			
1	054	2,01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pe nanggulan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Tersedianya Dokumen NS yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	gan PM			1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000	0	0	Kab. Garut, Tarog Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana uAnglok asi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat dan Lembaga	1 Dokumen 1 Dokumen	100.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran

1	0	0	2,	0	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	88 Laporan 88 Orang	88 Laporan 88 Orang	4.945.375.000	3.186.424.000	3.183.678.280	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana uAnglok asi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat dan Lembaga	88 Laporan 88 Orang	6.520.375.000	Dinas Pemadam Kebakaran
---	---	---	----	---	---	---	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------	--------------------------------------	--	--	---	---------------------	---------------	-------------------------

1	0	0	2,	0	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	4	4	450.000.000	1.138.449.800	1.138.449.800	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurpangg	Dana Transfer Umum-Dana Anglokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat dan Lembaga	4	450.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
---	---	---	----	---	--	--	---	---	-------------	---------------	---------------	-------------------------------------	--	--	---	---	-------------	-------------------------

1	054016				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				17 jenis 17 Jenis	17 jenis 17 Jenis	4.412.860.847	1.068.080.000	1.065.164.000	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana uAnglok asi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat dan Lembaga	17 jenis 17 Jenis	4.412.860.847	Dinas Pemadam Kebakaran
1	054017				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki				50 Orang 50 orang	50 Orang 50 orang	360.000.000	551.113.500	540.091.500	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana uAnglok asi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat dan Lembaga	50 Orang 50 orang	360.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran



						Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran													
1	0	0	2,	0	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	1	a1haDnesa /Kelur 1 paket	ahan 100,000,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangg	Dana Transfer Umum-Dana uAnglokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat dan Lembaga	1	ahan 150,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran	



1	054019	054019	054019	054019	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Terselenggaranya Peringatan HUT Damkar Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten				1 Dokumen 1 Kegiatan 80 %	1 Dokumen 1 Kegiatan 80 %	100.000.000	85.992.000	63.633.000	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurpangg	Dana Transfer Umum-Dana uAnglokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat dan Lembaga	1 Dokumen 1 Kegiatan 80 %	100.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	05402	05402	05402	05402	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	Meningkatnya Pengawasan Pencegahan, penanggulangan Kebakaran	%	%	100 %	100 %	<b>150.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>35.030.000</b>						100 %	<b>150.000.000</b>	

1	054201	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk yang Dipersyaratkan Haru Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebaka	ung an s g ung an ran			100 Dokumen 100 Unit Gedung Bangunan	n100 Dokumen 100 Unit Gedung Bangunan	n 100,000,000	50.000.000	35.030.000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpang	Dana Transfer Umum-Dana uAnglokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Masyarakat, dan Lembaga	100 Dokumen 100 Unit Gedung Bangunan	n 100,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	054202	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingk yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Stand Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	ung an g ar			50 Dokumen 50 Unit Gedung Bangunan	50 Dokumen 50 Unit Gedung Bangunan	50.000.000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpang	Dana Transfer Umum-Dana uAnglokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Masyarakat, dan Lembaga	50 Dokumen 50 Unit Gedung Bangunan	50.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran

1	05	04	2,03		<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	Meningkatnya Kualitas Investigasi Kejadian Kebakaran	%	%	4 %	4 %	<b>100.000.000</b>	0	0					4 %	<b>100.000.000</b>		
1	05	04	2,03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			5 Dokumen 5 Orang	5 Dokumen 5 Orang	100.000.000	0	0	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurpang	Dana Transfer Umum-Dana uAngloKasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Masyarakat maupun Lembaga Korban Kebakaran	5 Dokumen 5 Orang	100.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	05	04	2,04		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam pencegahan Dini Bahaya Kebakaran	%	%	100 %	100 %	<b>700.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>133.845.100</b>						100 %	<b>700.000.000</b>	

1	05404	0204	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya				800 Orang 800 Orang	800 Orang 800 Orang	300.000.000	50.000.000	46.331.700	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana uAnglok asi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Masyarakat dan Lembaga	800 Orang 800 Orang	300.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	05404	0204	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Tersedianya Dokumen Pembentukan				20 Desa/ Kelu 20 Desa	20 Desa/ Kelu 20 Desa	300.000,000	100.000.000	87.513.400	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum-Dana uAnglok asi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Masyarakat dan Lembaga	20 Desa/ Kelu 20 Desa	300.000,000	Dinas Pemadam Kebakaran



					Manusia																	
1	05	04	2,05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				6000 Laporan 6000 Orang	n6000 Laporan 6000 Orang	n 100,000,000	0	0	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurpang	Dana Transfer Umum-Dana uAnglokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat dan Lembaga	6000 Laporan 6000 Orang	n 150,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran
1	05	04	2,05	02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Meningkatnya Peralatan penanganan penyelamatan non kebakaran (Rescue)				4 enis	4 enis	100.000.000	0	0	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurpang	Dana Transfer Umum-Dana uAnglokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur	Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat dan Lembaga	4 enis	100.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran



1	05	04	2,05	03	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi</p> <p>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis</p>	2 Unit 2 Jenis	2 Unit 2 Jenis	50.000.000	0	0	<p>Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpang</p>	<p>Dana Transfer Umum- Dana uAnglokasi Umum</p>	<p>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</p>	<p>7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparat ur</p>	<p>Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat dan Lembaga</p>	2 Unit 2 Jenis	50.000.000	<p>Dinas Pemadam Kebakaran</p>
---	----	----	------	----	--	-------------------	-------------------	------------	---	---	---	---	--	--	--	-------------------	------------	--------------------------------

1	0	0	2,	0	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	40 Laporan 40 Orang	40 Laporan 40 Orang	100.000.000	50.000.000	44.319.200	Kab. Garut, Tarong Kidul, Haurp angg	Dana Transfer Umum- Dana uAnglok asi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat dan Lembaga	40 Laporan 40 Orang	100.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
<b>TOTAL</b>									<b>25.129.825.618</b>	<b>18.209.785.801</b>	<b>17.669.655.679</b>							<b>27.635.899.615</b>	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Setiap usulan dan aspirasi dari masyarakat melalui forum Gabungan SKPD dan Musrenbang selalu diakomodir disesuaikan dengan program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang tersedia. Apabila terdapat usulan yang belum terakomodir diusulkan pada tingkat Provinsi.

Untuk hasil musrenbang, belum adanya usulan yang masuk dari masyarakat untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut.

### 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut melalui musrenbang tingkat kecamatan mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pembangunan POS Pemadam Kebakaran, peningkatan infrastruktur daerah dan peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut.

### 2.5.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut

#### 2.5.2.1 Sumber Daya Manusia

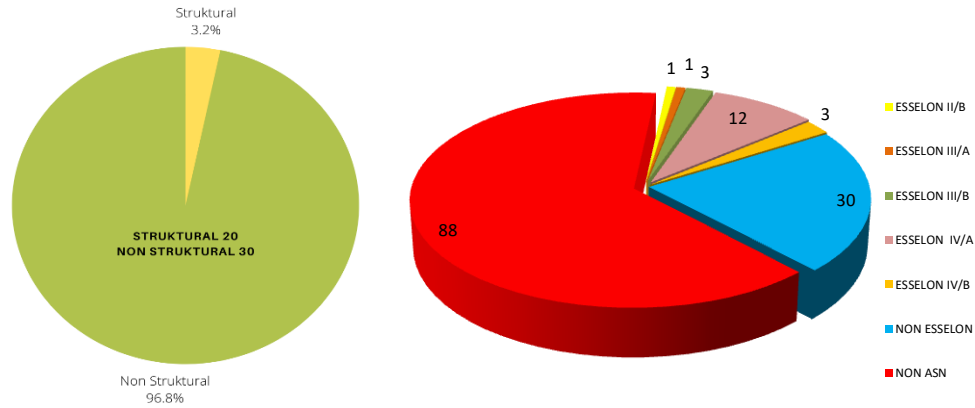
Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran, SDM yang dimiliki Dinas saat ini sebanyak 138 orang yang terdiri dari 50 orang ASN, 2 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan 86 orang Tenaga Sukarelawan (TKS). Berdasarkan golongan, SDM di Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari:

**Tabel 2.5.2.1.1**

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	2
4	Penata Tk. I	III/d	3
5	Penata	III/c	8
6	Penata Muda Tk. I	III/b	7
7	Penata Muda	III/a	7
8	Pengatur Tk. I	II/d	14
9	Pengatur	II/c	6
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1

11	Pengatur Muda	II/a	-
12	Juru Muda	I/a	-
<b>Jumlah</b>			<b>50</b>

**Gambar 2.5.2.1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan**



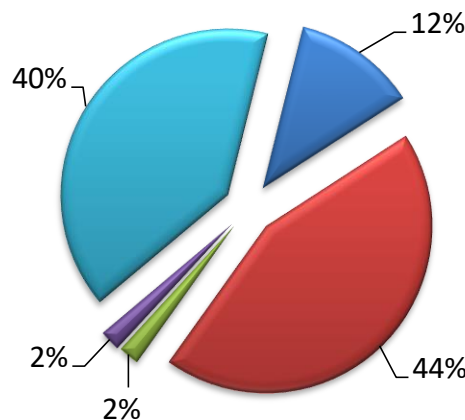
Berdasarkan jabatan ASN, SDM di Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian, 7 orang Kepala Seksi, 3 orang Kepala UPTD dan 3 orang Kasubbag UPTD dan 1 orang Jabatan Fungsional.

Untuk tingkat pendidikan, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki SDM dengan tingkat pendidikan sebagai berikut: - Pendidikan S2 sebanyak 6 orang atau sebesar 12%. - Pendidikan S1 sebanyak 22 orang atau sebesar 44% - Pendidikan Diploma IV sebanyak 1 orang - Pendidikan Diploma II sebanyak 1 orang atau sebesar 2% - dan Pendidikan SMA sebanyak 20 orang atau sebesar 44%, sebagaimana gambar 2.2

**Gambar 2.5.2.1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan  
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut**

■ S2 ■ S1 ■ DIPLOMA IV ■ DIPLOMA II ■ SLTA



Selanjutnya SDM Dinas Pemadam Kebakaran yang sudah mengikuti pelatihan penjenjangan sebagai berikut:

**Tabel 2.5.2.1.2**  
**Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Penjenjangan**

No	Pelatihan Penjenjangan	Pelatihan Penjenjangan
1	DIKLAT PIM Tk. II	1
2	DIKLAT PIM Tk. III	3
3	DIKLAT PIM Tk. IV	10
Jumlah		14

### 2.5.3 Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut

#### 2.5.3.1 Sarana dan Prasarana Kantor

Sebagai SKPD baru di Kabupaten Garut, Dinas Pemadam Kebakaran saat ini belum mempunyai gedung, peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai. Dinas pemadam kebakaran masih menempati kantor lama dengan luas dan fasilitas yang minim untuk sebuah dinas. Adapun data sarana dan prasarana kantor yang dimiliki saat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5.3.1**  
**Prasarana Gedung Kantor**

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Ket
1	Markas Komando	1	Lokasi	Kurang Baik
2	Unit Pelayanan Teknis	3	Kecamatan	Baik
3	POS Pemadam Kebakaran	3	POS	Baik

**Tabel 2.5.3.2**  
**Perlengkapan Kantor**

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Ket
1	Komputer	5	Unit	Baik
2	Laptop	10	Buah	Baik
3	Printer	8	Buah	Baik
4	Meja	26	Buah	Baik
5	Kursi	30	Buah	Baik
6	Lemari Besi	1	Buah	Baik
7	White Bord	1	Buah	Baik
8	Kursi Tamu	1	Set	Kurang Layak
9	Mesin Tik	1	Buah	Kurang Layak

**Tabel 2.5.3.3**  
**Perlengkapan Rumah Tangga**

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Keterangan
1	Dispenser	3	Buah	Baik
2	Kompor Gas	1	Buah	Baik
3	Rak Piring	4	Buah	Baik
4	Piring	5	Lusin	Baik
5	Gelas	5	Lusin	Baik

**Tabel 2.5.3.4**  
**Jumlah dan jenis Sarana dan Prasarana**

No	Nama Mobil / Peralatan lainnya	JUMLAH		KONDISI EKSISTING					JUMLAH	KET					
				Disdamkar (Mako)	UPT LIMBANGAN	UPT PAMEUNGPEUK	UPT BUNGBULANG	POS LELES							
1	Mobil Operasional (HIACE)	1	Unit	1	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	1	0		
2	Unit Pancar Tanpa Tengki (Hibah Jepang)	2	Unit	2	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	2	0		
3	Mobil Unit Pancar	9	Unit	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	9	0		
4	Mobil Unit Water Suplay	2	Unit	2	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	2	0		
5	Fire House (Selang Pemadam)												0		
	Ukuran 2,5"	5	Roll	3	Roll	5	Roll	8	Roll	8	Roll	5	Roll	56	0
	Ukuran 1,5"	6	Roll	2	Roll	6	Roll	11	Roll	1	Roll	5	Roll	64	0
6	Nozzle													0	
	Ukuran 2,5"	1	Buah	3	Buah	2	Buah	2	Buah	2	Buah	1	Buah	10	5
	Ukuran 1,5"	1	Buah	7	Buah	2	Buah	3	Buah	1	Buah	1	Buah	14	1
7	Pistol Nozzle (Nozzle Gun)													0	
	Ukuran 1,5"	2	Buah	6	Buah	1	Buah	3	Buah	6	Buah	1	Buah	17	9
	Ukuran 2,5"	2	Buah	7	Buah	2	Buah	0	Buah	2	Buah	1	Buah	12	8
8	Mesin Portable (Tohatsu)	2	Unit	2	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	2	0		
9	Cabang (Y Conection)													0	
	Ukuran 2,5"x1,5"x1,5"	1	Buah	7	Buah	1	Buah	1	Buah	2	Buah	1	Buah	12	3
	Ukuran 1,5"x1,5"x1,5"	1	Buah	8	Buah	1	Buah	0	Buah	1	Buah	1	Buah	11	4
10	Ploting Pump	1	Buah	7	Buah	2	Buah	1	Buah	2	Buah	0	Buah	12	0

11	Alat komunikasi Radio (RIG)	15 Buah	7 Buah	2 Buah	3 Buah	2 Buah	1 Buah	15	0
12	Handky Talky (HT)	24 Buah	12 Buah	4 Buah	4 Buah	4 Buah	0 Buah	24	0
13	Tower alat komunikasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	4	0
14	Sepatu tahan panas	20 Pasang	8 Pasang	4 Pasang	4 Pasang	4 Pasang	0 Pasang	20	0
15	Jaket tahan panas	23 Buah	10 Buah	4 Buah	4 Buah	5 Buah	0 Buah	23	0
16	Helm pemadam	27 Buah	10 Buah	4 Buah	3 Buah	4 Buah	6 Buah	27	0
17	Brething Aparatus	7 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	7	0
18	Gergaji Listrik	7 Unit	5 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	7	0
19	Tabung APAR	10 Unit	2 Unit	1 Unit	3 Unit	4 Unit	0 Unit	10	0
20	Mesin Alkon	6 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	6	0

Saat ini, peralatan yang dimiliki Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut masih standar, hanya untuk menangani kebakaran dalam skala kecil seperti penanganan kebakaran di pemukiman dan rumah penduduk. Jumlah ideal armada pemadam kebakaran.

sesuai dengan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dalam Permendagri 114 tahun 2018 yaitu di setiap kantor kecamatan harus terdapat Pos Sektor Pemadam Kebakaran yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.

Dimana kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Garut Yaitu 42 sektor pos/kecamatan, 42 mobil unit pemadam, 42 unit mobil rescue, dan 504 anggota pemadam.

Selain gedung dan mobil operasional, yang harus menjadi prioritas anggaran saat ini adalah perlengkapan perlindungan diri (safety) dari petugas pemadam kebakaran dan perlengkapan pendukung lainnya untuk pemadam kebakaran dan penyelamatan.

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan dalam upaya pencapaian visi dan misi rencana pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah mulai tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Penerapan prinsip peraturan tersebut menjadi alasan utama perubahan Renja Kabupaten Garut. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah. Hal ini berarti program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dan mendapatkan anggaran.

### **4.2. Matriks Rencana Kerja Tahun 2023**

Matriks Rencana Kerja Tahun 2023 dapat kami sajikan pada table dibawah ini



**Tabel 4.2.1**  
**Matriks Rencana Kerja Tahun 2023**

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Targe t Capai an Kinerja	Keluar an Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana	Catat an Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Progr am								Tolok Ukur	Targ et	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										17.961.237.149	14.767.632.688			
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										11.314.907.809	6.796.758.018		
1	5	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										30.397.503	34.627.800	
1	5	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhi nya Tingkat Ketepatan Penyelesaia n Perencanaa n	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	10 Dokumen	100 Poin	10.342.733	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	12.293.280

1	5	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Meningkatnya kualitas penyajian dokumen perencanaan SKPD	Terpenuhiya Tingkat Ketepatan Penyelesaian Perencanaan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	10 Dokumen	100 Poin	20.054.770		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	22.334.520
1	5	1	02.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>5.628.010.073</b>			<b>5.786.654.738</b>	

1	5	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terbayarnya Gaji ASN di Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	14 Bulan	100 Persen	5.628.010.073	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	5.786.654.738
1	5	1	02.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									<b>256.560.600</b>		<b>292.804.400</b>		
1	5	1	02.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya Peralatan penunjang disiplin Pegawai	Persentase SDM aparatur yang Profesional	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	4 Unit	100 Poin	44.616.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	30.304.400

1	5	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	tersedianya pakaian Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase SDM aparatur yang Profesional	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	208 Stell	100 Poin	211.944.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	262.500.000
1	5	1	02.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>150.408.070</b>		<b>156.065.500</b>		
1	5	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan Penerangan dan Instalasi Listrik	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	9 Jenis	100 Poin	7.169.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	6.212.900
1	5	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	34 Jenis	100 Poin	72.714.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	57.475.000

1	5	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan rumah tangga dinas	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	5 Jenis	100 Poin	14.772.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	19.550.600
1	5	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	5 Jenis	100 Poin	9.788.800		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	8.288.800
1	5	1	02.06	6	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar/Majalah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	142 Eksempl	100 Poin	8.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	8.475.000

1	5	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah tamu dan peserta rapat yang mendapatkan jamuan makan minum	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	1020 OH	100 Poin	8.125.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	9.559.200
1	5	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	192 OH	100 Poin	19.365.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	24.796.000
1	5	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	100%	100 Poin	9.996.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	21.708.000
1	5	1	02.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>4.873.478.663</b>				<b>142.983.400</b>	

1	5	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang baru	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	1 Unit	100 Poin	778.830.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	-
1	5	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya jumlah Mebeulair yang memadai	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	9 Jenis	100 Poin	142.140.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	132.390.000
1	5	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	4 Buah	100 Poin	185.573.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	10.593.400

1	5	1	02.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	1 Unit	100 Poin	3.766.933.173	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	-
1	5	1	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>103.532.900</b>			<b>120.826.800</b>		
1	5	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya penerangan, internet, dan telepon yang berfungsi dengan baik	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	12 Bulan	100 Poin	69.946.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	92.926.800



1	5	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Pembayaran atas Jasa Perbaikan/Pemeliharaan (Service)	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	2 Jenis	100 Poin	9.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	9.900.000
1	5	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan dan Perlengkapan kebersihan	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	2 Jenis	100 Poin	23.686.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	18.000.000
1	5	1	02.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>272.520.000</b>				<b>262.795.380</b>	

1	5	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya kendaraan Dinas dan Operasional dengan surat-surat kendaraan lengkap	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	21 STNK	100 Poin	52.870.000		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	52.870.000
1	5	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Tersedianya kendaraan Operasional dengan surat-surat kendaraan lengkap	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	2 Jenis	100 Poin	28.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	28.850.000

1	5	1	02.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Bangunan Gedung yang layak	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	100 Poin	7 Bangunan Kantor	100 Poin	190.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran	100 Poin	181.075.380
1	5	4			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>							<b>6.646.329.340</b>			<b>7.970.874.670</b>		
1	5	4	02.01		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>6.433.135.040</b>			<b>7.220.874.670</b>		
1	5	4	02.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (Lanjutan)	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	1 Dokumen	69%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	100.000.000

1	5	4	02.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Kesiapan Petugas dalam Penangan Kebakara	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	115 Orang	69%	3.068.019.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	3.353.196.280
1	5	4	02.01	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dalam kondisi siap pakai	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	4 Jenis	69%	1.781.249.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	1.406.121.400

1	5	4	02.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Meningkatnya Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran		Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	29 Jenis	69%	1.184.625.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	1.381.306.990
1	5	4	02.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang Berkompetensi Sertifikat Pemadam 2	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	50 orang	69%	335.607.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	721.500.000

1	5	4	02.01	8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Tersedianya sistem informasi penanganan kebakaran dan penyelamatan	Persentase Layanan Pencegahan , pemadaman , Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	1 paket	69%	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	150.000.000
---	---	---	-------	---	---	--	--	--	---	-----------	---------	-----	---	---------------------------------------	--	-----------	-------------

1	5	4	02.01	9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Terselenggaranya Peringatan HUT Damkar Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	Persentase Layanan Pencegahan, pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di kabupaten	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	48%	69%	63.633.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	108.750.000
1	5	4	02.02		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>								35.030.000		150.000.000		

1	5	4	02.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya jumlah gedung yang terproteksi kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	100 Unit Gedung Bangunan	100 Persen	35.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	100.000.000
1	5	4	02.02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya jumlah gedung yang terproteksi kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	50 Unit Gedung	100 Persen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	50.000.000
1	5	4	02.03		<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>								-		-		



1	5	4	02.03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Kualitas SDM Investigator Kebakaran	Tersedianya Investigator Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	5 Orang	5 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	-
1	5	4	02.04		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>							<b>133.845.100</b>				<b>500.000.000</b>	

1	5	4	02.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	800 Orang	100%	46.331.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	250.000.000
1	5	4	02.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	20 Desa	100%	87.513.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	250.000.000

1	5	4	02.04	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam pencegahan dini bahaya kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanganan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69 Persen	100 Buah	100%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69 Persen	-
1	5	4	02.05		<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>							<b>44.319.200</b>			<b>100.000.000</b>		

1	5	4	02.05	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya penanganan penyelamatan non kebakaran (Rescue)	Persentase Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69%	6000 Orang	100%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69%	-
1	5	4	02.05	2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Peralatan penanganan penyelamatan non kebakaran (Rescue)	Persentase Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban		69%	4 enis	100%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69%	-

1	5	4	02.05	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Peralatan penanganan penyelamatan non kebakaran (Rescue)	Persentase Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69%	2 Jenis	100%	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69%	-
1	5	4	02.05	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	Meningkatnya Jumlah Petugas Penyelamatan (Rescue) yang Berkompetensi	Persentase Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpangung	69%	40 Orang	100%	44.319.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Layanan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan Terdampak Kebakaran di Kabupaten	69%	100.000.000
<b>TOTAL</b>												<b>17.961.237.149</b>		<b>14.767.632.688</b>			

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan tahun berjalan dalam RPJMD Kabupaten Garut tahun 2019-2024. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian akan menjadi fokus pencapaian target pada Renstra SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Dengan demikian Rencana Kerja tahun 2023 harus fokus terhadap target-target pada program dan kegiatan yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut merupakan tanggung jawab bersama, secara struktural satu sama lain saling terkait sehingga dalam pelaksanaannya harus terpadu dan terjalin koordinasi yang baik.

Sebagaimana diketahui tugas Pemadam Kebakaran secara logis akan terus berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan. Berkenaan hal tersebut dituntut kesungguhan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan.

Sikap terbuka, toleran dan kesediaan untuk kerjasama secara positif dan kreatif akan menambah keberhasilan program. Sehingga apa yang menjadi harapan organisasi terhadap keberhasilan program dan kegiatan dimaksud dapat mengantarkan terwujudnya visi dan misi Kabupaten Garut.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh jajaran pejabat struktural Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan rencana kerja secara sinergis dan terintegrasi.
2. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Garut tahun 2023.
3. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023.

4. Dalam rangka menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap pejabat struktural wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkan secara berkala triwulan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut melalui Sekretaris.
5. Rencana kerja tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir tahun 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN